

# KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TERHADAP PENDUDUK MIGRAN (Studi pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan)

---

 Oleh: ROSFIAN VIRYA ( 04230003 )

Government Science

Dibuat: 2010-06-23 , dengan 6 file(s).

**Keywords:** PENDUDUK MIGRAN

## ABSTRAKSI

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Balikpapan menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang yang bermigrasi untuk berkunjung dan menetap sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, khususnya pendatang dari Propinsi Jawa Timur yang cukup besar. Oleh karena itu pengendalian laju pertumbuhan penduduk (terutama yang disebabkan faktor migrasi) sangat diperlukan guna mencegah timbulnya berbagai persoalan sosial. Selama ini Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan sudah mengantisipasi kemungkinan ini sehingga dibuat Peraturan Daerah (PERDA) mengenai manajemen kependudukan. Dibandingkan dengan daerah lain, Kota Balikpapan memiliki sistem manajemen kependudukan yang paling baik dan paling ketat di Tanah Air. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi sebelum seseorang diakui sebagai penduduk Balikpapan yang dibuktikan dengan KTP. Bukan sekadar basa-basi, tetapi aparat pemerintah lokal menerapkannya secara ketat, antara lain dengan sering merazia KTP di pelabuhan, jalan raya, pusat keramaian, dan bahkan dari pintu ke pintu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahannya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil data yang diperoleh (1). Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang sudah dilaksanakan, namun belum berjalan secara maksimal, sebab manajemen pendaftaran, pencatatan dan pengelolaan data kependudukan belum dilakukan secara baik dan tertib. Selain itu proses pembuatan KTP yang terkesan rumit membuat sebagian warga pendatang merasa kesulitan. (2) Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang Sedang berjalan, yaitu program penanggulangan kemiskinan yang diserahkan kepada dinas-dinas terkait dalam bentuk pelayanan satu atap. Sedangkan pelayanan bidang kesehatan warga miskin mendapat pelayanan kesehatan melalui 2 cara yaitu: Mekanisme kapasitas dan mekanisme fee for service. Pelayanan bidang pendidikan, yaitu dengan program bantuan siswa gakin diberikan dengan hanya menunjukkan KTP gakin kepada Satgas. Pelayanan bidang pelatihan keterampilan juga ditunjang keberadaan lapangan kerja yang cukup memadai. Pelayanan bantuan modal usaha diberikan oleh Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) dalam bentuk pinjaman dana bergulir tanpa bunga untuk kegiatan yang bersifat mikro. (3) Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang Belum berjalan, yaitu Pembuatan KTP sekaligus Single Identity Number yang akan dikembangkan untuk berbagai kepentingan yang lebih luas dan dapat diakses melalui satu nomor identitas tunggal atau SIN (Single Identity Number). Sedangkan Pembenahan kualitas SDM, program manajemen kependudukan dan sistem administrasi kependudukan tetap terus dilanjutkan.

pembangunan kependudukan seperti pengendalian pertumbuhan penduduk, pengarahan dan persebaran mobilitas penduduk serta peningkatan kualitas penduduk dan didukung dengan sistem administrasi dan informasi kependudukan yang andal. (4) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah keberadaan PERDA No 22 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006. Sementara ini masih bisa dilaksanakan terus, berarti belum perlu dilakukan penyesuaian lagi jika dihubungkan dengan perkembangan kota. Selain itu spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil

Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang sudah dilaksanakan saat belum berjalan secara maksimal. Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang Sedang berjalan, yaitu program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan pelayanan KTP/KK, Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan Keterampilan secara Gratis dan Pemberian Modal Usaha. Sedangkan yang Belum berjalan, yaitu Pembuatan KTP sekaligus Single Identity Number yang akan dikembangkan untuk berbagai kepentingan yang lebih luas dan dapat diakses melalui satu nomor identitas tunggal atau SIN (Single Identity Number). Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan adalah keberadaan PERDA No 22 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006.

## ABSTRACT

Growth of development which fast progressively in Town of Balikpapan become separate fascination to resident which is have migration to pay a visit and remain to so that cause the make-up of the amount of resident, specially migration big enough Province East Java. Therefore operation of resident growth rate (especially which is caused by migration factor) very needed to utilize to prevent incidence of various problem of social. During the time Government of Town and of DPRD Balikpapan have anticipated this possibility is so that made by Law (PERDA) concerning management of resident. Compared to other area, Town of Balikpapan have management system resident tightest and best in Fatherland. There is certain conditions which must by before someone confessed as resident of proved Balikpapan with KTP. Non merely platitude, but local governmental government officer applying him tightly, for example often KTP checking in port, roadway, center bustle, and even from door to door.

This research is conducted by using approach qualitative with descriptive method. Technique of data collecting conducted by through: Observation and interview and also documentation. After done by inspection validity, data analysed by presentation of data at one blow analysed and the conclusion withdrawal.

From result of obtained data: (1). Program On duty residential and Note Civil Town of Balikpapan which have been executed in this time not yet walked maximally because registration management, record-keeping and management data of residential not yet been conducted well and order. Like making KTP at the same time security fee which is allotment at society less as expected, not to mention system giving of resident identity still weaken. But to given by impecunious citizen of service making of KTP free of charge. Process of KTP impressing lengthen bureaucracy make as citizen of pendatang feel difficulty. Even though to owner of Impecunious KTP also get social aids for example by getting insurance guarantee can raise its claim, namely if/when passing away habit obtain;get 500 thousand, while if passing away

because accident get 2 million. To ineligible migration as resident of Balikpapan hence security fee returned to the expense of returning to him area. (2) Program On duty residential and Note Civil Town of Balikpapan which is walking, that is program prevention of poorness by giving service of KTP / KK, Health, Education, Training of Skill Free of charge and giving of Capital Employed. Program prevention of the poorness delivered to related on duty service form one roof. While service of area health of impecunious citizen get service of health through 2 way of that is: mechanism of Kapitasi and mechanism of fee executed service for in all hospital signing up with Government of Town. passed to Facility is its citizen (health guarantee to impecunious citizen ( FREE). Service of educational, that is with student aid program of gakin given with only showing KTP gakin to Satgas. For the program of prevention of poorness very felt by its benefit by impecunious family, although in a few case met by constraint like delay of liquefaction at the time of new school year. Service of area training of skill also supported by existence of employment which enough adequate. Than year data 2001, contribution which enough signifikan develop;build economics of Town of Balikpapan. Service of capital employed aid given by On duty Co-Operation, industrial and Commerce (Diskopindag) in the form of fund loan of bergulir interest free for activity having the character of micro and at maximal first phase of 2 million. (3) Program On duty residential and Note Civil Town of Balikpapan which not yet walked, that is Making of KTP at the same time Single Identity Number to be developed to various broader importance and can be accessed to through one single identity number or SIN (Single Identity Number). Card Sign Resident ( KTP) with standard " Card" this is drawn up as Card of simple able to access various requirement of his owner, good to business transaction and also other need like accessing information. While Correction of quality of SDM, management program of residential administrate system and of residential remain to continue to be continued. development of residential like operation of growth of resident, resident mobility disseminating and guidance and also the make-up of the quality of resident and supported with administrate system and information of residential which is andal have to remain to be defended. (4) Constraints faced On duty residential and Note Civil Town of Balikpapan is existence of PERDA No 22 Year 2002 unconstitutionaling No 23 Year 2006. For while this still can be executed to continue, meaning not yet needed to be conducted by adjustment if attributed to growth of town. But if attributed to order of him, of course shall be adapted for which interfere in. Besides specification of Levying and Operation Of Blanko KK, KTP, Book of Register Deed and Citation Deed Note Civil.